

JURNAL

**KAJIAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA NELAYAN BURUH
DI DESA PULAU HALANG MUKA KECAMATAN KUBU BABUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU**

OLEH

**DENI SYAPUTRA
1304156786**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2018**

**KAJIAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA NELAYAN BURUH DI DESA
PULAU HALANG MUKA KECAMATAN KUBU BABUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU**

Oleh

Deni Syaputra¹⁾, Ridar Hendri²⁾, Firman Nugroho²⁾
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau
Email: Syaputradeni09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – Mei 2017 di desa Pulau Halang Muka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kemiskinan, mendeskripsikan kondisi kemiskinan, dan untuk memberikan saran penanggulangan kemiskinan. Metode penelitian adalah menggunakan gabungan dari metode kualitatif dan kuantitatif, dan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga nelayan buruh adalah berkategori miskin. Penyebab kemiskinan nelayan adalah : (1) Produksi perikanan rendah (2) Pendapatan rumah tangga nelayan rendah, (3) Pekerjaan alternatif kurang (4) Modal yang terbatas (5) Tingkat pendidikan rendah, (6) Nelayan masih bergantung dengan pemilik kapal, (7) Beban keluarga yang banyak dan (8) Pola konsumsi boros. Upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Rokan Hilir untuk masyarakat nelayan berupa bantuan alat penangkapan, seperti kapal, jaring dan dari pemerintah pusat seperti Bantuan Langsung Tunai, Beras Sejahtera, asuransi nelayan dan Pengembangan Usaha Mina Perikanan. Dalam pelaksanaan bantuan tersebut masih sarat akan nepotisme sehingga tidak tepatnya sasaran bantuan. Implikasi penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu : (1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat nelayan dengan sosialisasi dan pelatihan, (2) Bimbingan dari tenaga penyuluh perikanan profesional, (3) Penumbuhan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama, (4) Permudah akses nelayan terhadap modal, (5) Menciptakan usaha alternatif dan (5) Meningkatkan partisipasi istri nelayan terhadap pendapatan rumah tangga.

Kata Kunci: Nelayan, Penyebab Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Pulau Halang Muka.

-
- 1) Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau
2) Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau

**STUDY OF HOUSEHOLD POVERTY OF THE FISHERMAN LABORS
IN THE VILLAGE OF HALANG MUKA ISLAND KUBU BABUSSALAM
DISTRICT ROKAN HILIR REGENCY RIAU PROVINCE**

By

**Deni Syaputra¹⁾, Ridar Hendri²⁾, Firman Nugroho²⁾
Fisheries and Marine Science Faculty Riau University
Email: Syaputradeni09@gmail.com**

ABSTRACT

This research was conducted in April until May 2017 at Halang Muka Island village. The purpose of this study is to find out the level of poverty, describe the condition of poverty, and to provide poverty reduction advice. The research method is using a combination of qualitative and quantitative methods, and using descriptive analysis.

The results of this study indicate that the average household of working fishermen is categorized as poor. The causes of fisherman poverty are: (1) low fishery production (2) low fisherman household income, (3) alternative employment less (4) limited capital (5) low education level, (6) fishermen still dependent on ship owner, 7) A large family load and (8) wasteful consumption patterns. The Rokan Hilir Government's efforts to combat fishing communities include fishing equipment, such as ships, nets and from central government such as Bantuan Langsung Tunai, Beras Sejahtera, Asuransi Nelayan and Pengembangan Usaha Mina Perikanan. In the implementation of the aid is still loaded with nepotism so that the aid target is not accurate. Implications of mitigation that can be done are: (1) Improve knowledge of fishermen community with socialization and training, (2) Guidance from professional fisheries extension workers, (3) growth and development of Kelompok Usaha Bersama (4) Facilitate fishermen access to capital, (5) Creating alternative business and (5) Increasing participation of wife of fisherman to household income.

Keywords: Fisherman, Cause of Poverty, Poverty Alleviation, Halang Muka Island.

- 1) Student in Fisheries and Marine Faculty Riau University
- 2) Lecturer in Fisheries and Marine Faculty Riau University

PENDAHULUAN

Kemiskinan dari masa ke-masa merupakan permasalahan langganan di negara-negara berkembang seperti di negara Indonesia. Menurut Bank Dunia salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*Lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan. dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*The poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka umumnya tidak memadai.

Menurut Kuncoro (2000), menyebutkan Penyebab kemiskinan bermula pada teori lingkaran setan kemiskinan. Yaitu adanya ketidak sempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas membuat rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan begitulah seterusnya.

Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat telah melaksanakan berbagai upaya untuk pengentasan kemiskinan, namun kenyataannya masih banyak masyarakat nelayan yang berada pada kemiskinan. Menurut Huraerah (2006), kurang efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan dikarenakan: (1) Kurangnya koordinasi antar institusi yang terlibat dalam penanganan masalah kemiskinan, tidak

seragamnya indikator kemiskinan, dan tidak validnya data kemiskinan, (2) Pangkalan data jumlah penduduk miskin masih rendah (3) Tidak adanya sinergisme program penanggulangan kemiskinan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. (4) Perogram penanggulangan kemiskinan masih diwarnai adanya indikasi KKN dalam penyaluran bantuan untuk keluarga miskin.

Kondisi serupa juga terjadi pada kehidupan masyarakat nelayan di Rokan Hilir yang dikenal dengan sumber daya perikanannya yang melimpah, Rokan Hilir juga berbatasan langsung dengan perairan Selat Malaka begitu pula dengan peluang ekspor yang sangat baik karna berdekatan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Namun hal tersebut ternyata belum mampu membuat masyarakatnya nelayannya keluar dari kemiskinan. Hanya sekelompok orang saja yang dapat menikmati kekayaan tersebut seperti pemberi modal dan juragan-juragan pemilik kapal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di dilaksanakan pada bulan April sampai Mei tahun 2017 di Desa Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan pertimbangan lokasi ini merupakan salah satu pemukiman nelayan dengan permasalahan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan gabungan antara metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Brymman dalam Sarwono (2006), mengajukan model penggabungan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif yaitu penelitian kualitatif

digunakan untuk memfasilitasi penelitian kuantitatif.

Sumber data dalam penelitian menggunakan informan yang merupakan tokoh masyarakat, dan 10% responden dari 250 nelayan yaitu 25 responden.

Untuk mendapatkan tujuan penelitian 1, yaitu untuk mengetahui tingkat kemiskinan rumah tangga nelayan buruh di Desa Pulau Halang, data temuan hasil observasi dan kuesioner yang telah dibagikan ke nelayan buruh dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran dan ditabulasikan menjadi pendapatan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, selisih pendapatan dengan pengeluaran rumah tangga nelayan buruh dan kriteria tingkat kemiskinan.

Untuk tujuan penelitian pertama tersebut, maka dibutuhkan analisis data pengeluaran, dan pengukuran tingkat kemiskinan.

1) Pengeluaran Rumah Tangga

$$Ct = C1 + C2 + C3 + C4$$

Keterangan :

Ct = Total Pengeluaran Rumah Tangga (Rp/tahun)

$C1$ = Pengeluaran untuk Pangan (Rp/tahun)

$C2$ = Pengeluaran untuk Sandang (Rp/tahun)

$C3$ = Pengeluaran untuk Papan (Rp /tahun)

$C4$ = Pengeluaran untuk lain-lain (Rp per tahun)

2) Tingkat Kemiskinan (Sajogyo).

a) Tidak miskin, yaitu apabila pengeluaran rumah tangga nelayan buruh perkapita per tahun ≥ 320 Kg beras atau setara Rp3.840.000/tahun.

b) Miskin, (nilai ambang kecukupan pangan) yaitu apabila pengeluaran perkapita per tahun < 320 Kg beras atau setara Rp3.840.000/tahun.

c) Miskin sekali, (tidak cukup pangan) yaitu apabila pengeluaran perkapita per tahun ≤ 240 Kg beras atau setara Rp2.880.000/tahun

d) Paling miskin, apabila pengeluaran rumah tangga perkapita per tahun ≤ 180 Kg beras atau setara Rp2.160.000/tahun.

Selanjutnya untuk mendapatkan tujuan penelitian 2, yaitu untuk mendeskripsikan mengapa terjadinya kemiskinan nelayan buruh di Desa Pulau Halang Muka, berdasarkan tujuan penelitian pertama selanjutnya dilakukan analisis dengan menjabarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dideskripsikan untuk mengaitkan bagaimana fakta-fakta yang ada memberikan pengaruh pada fenomena kemiskinan.

Untuk mendapatkan tujuan penelitian ketiga, yaitu mendeskripsikan bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah di analisis secara deskriptif mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dilapangan.

Untuk mendapatkan tujuan keempat yaitu untuk mengetahui implikasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di analisis secara deskriptif untuk mendapatkan saran penanggulangan kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Dan Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan Buruh

Responden dalam penelitian ini memiliki sumber pendapatan keluarga yang berasal dari kegiatan perikanan dan non perikanan. Umumnya kegiatan penangkapan ikan bagi rumah tangga tangga nelayan merupakan sumber utama pendapatan rumah tangga.

Dalam penelitian ini berdasarkan musim penangkapan,

Tabel 1. Pendapatan Per-Rumah Tangga Nelayan Buruh Responden Desa Pulau Halang Muka pada Musim Timur

Sumber Pendapatan	Rata-rata (Rp/bulan)	Interval (Rp/bulan)
Penangkapan Ikan	1.320.000	1.300.000 – 1.350.000
Non Penangkapan Ikan	108.000	80.000 – 200.000
Pendapatan Rumah Tangga	1.428.000	1.300.000 – 1.550.000

Sumber : Data primer

Adapun rata-rata pendapatan per-rumah tangga nelayan buruh

pendapatan dibagi menjadi musim banyak ikan (musim timur) dan musim paceklik (musim barat), hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pendapatan yang besar antara musim tersebut. Adapun rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan buruh responden pada musim timur dapat dilihat pada Tabel 1.

responden pada musim barat dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Pendapatan Per-Rumah Tangga Nelayan Buruh di Desa Pulau Halang Muka pada Musim Barat

Sumber Pendapatan	Rata-rata (Rp/bulan)	Interval (Rp/bulan)
Penangkapan Ikan	220.800	150.000 – 290.000
Non Penangkapan Ikan	108.000	80.000 – 200.000
Pendapatan Rumah Tangga	328.800	200.000 – 490.000

Sumber : Data primer

Jika dibandingkan dengan pendapatan pada musim timur, pendapatan pada musim paceklik terjadi penurunan hingga 77 %. Berbeda dengan pendapatan dari non penangkapan ikan yang dilakukan istri nelayan rata-rata pendapatan mereka tetap sama yaitu rata-rata Rp108.000/bulan, hal ini dikarenakan pekerjaan sebagai pedagang serta buruh pengolah tidak dipengaruhi oleh musim. Adanya musim barat membuat nelayan tidak dapat melaut karna angin kencang dan berombak yang dikhawatirkan membahayakan nelayan melakukan penangkapan ikan dilaut, sehingga pada musim paceklik nelayan tidak dapat menangkap ikan sesering pada musim timur dan walaupun

melakukan penangkapan ikan pengoperasian tidak jauh dari Pulau Halang.

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa jika dirata-ratakan jumlah pendapatan rumah tangga nelayan buruh dalam setahun (termasuk musim timur dan musim barat/paceklik) adalah Rp1.153.200/bulan. Jumlah tersebut belum mampu menghidupi keluarga nelayan buruh bila dilihat dari rata-rata pengeluaran mereka. Sehingga untuk memenuhi kekurangan nelayan diberikan pinjaman oleh majikannya.

Adapun upah minimum Kabupaten (UMK) Rokan Hilir tahun 2017 sebesar Rp2.305.346,13, Meskipun para pemilik usaha penangkapan tidak membayar

buruhnya berdasarkan UMK melainkan sistem bagi hasil, namun pendapatan rata-rata yang diterima nelayan buruh perbulannya tersebut masih jauh dari angka UMK.

Kebutuhan pangan mereka meliputi kebutuhan untuk membeli beras, lauk-pauk, sayur-mayur, buah-buahan, teh, gula, kopi, garam,

bumbu dapur, minyak goreng dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan non pangan terdiri dari biaya untuk kebutuhan listrik, pulsa Hp, pendidikan anak, kesehatan, pakaian, biaya transportasi, biaya sosial, biaya jajan ke warung kopi/rokok, dan lain-lain.

Tabel 4. Pengeluaran Per-Rumah Tangga Nelayan Buruh Desa Pulau Halang Muka

Jenis Pengeluaran	Jumlah Pengeluaran Rumah Tangga			
	Per Tahun		Per Bulan	
	Interval	Rata-rata	Interval	Rata-rata
Kebutuhan Pangan	10.200.000 – 12.600.000	11.121.600	840.000 – 1.000.000	926.800
Kebutuhan Non Pangan	3.444.000 – 5.268.000	4.324.320	287.000 – 439.000	360.360
Pengeluaran RT.	16.704.000 – 21.828.000	15.445.920	1.197.000 – 1.439.000	1.287.160

Sumber : Data primer

Berdasarkan Tabel 4 terlihat pengeluaran yang paling besar adalah pengeluaran untuk kebutuhan pangan rata-rata lebih besar 72 % dari kebutuhan non pangan, Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan tersebut relatif masih rendah. Hukum Engel menyebutkan bahwa semakin tinggi persentase pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan maka semakin rendah tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Dari Tabel tersebut juga diketahui bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan buruh di Desa Pulau Halang lebih besar dari pada pendapatannya.

Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Buruh

Dari hasil penelitian 66 % responden termasuk dalam kategori miskin sekali yaitu 14 orang responden dengan rata-rata pengeluaran perkapita pertahun senilai dengan 218 Kg beras atau setara dengan Rp2.617.257/tahun,

selebihnya 44 % yaitu 11 responden berada pada kategori miskin dengan rata-rata pendapatan perkapita pertahun senilai dengan 271 Kg beras atau setara Rp3.259.257/tahun.

Penyebab Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Buruh di Desa Pulau Halang Muka

1) Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator dari kualitas sumber daya manusia, golongan masyarakat yang berpendidikan rendah, produktivitasnya rendah. Rendahnya produktivitas akan rendah pula pendapatannya. Dan rendahnya pendapatan sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga yang akan menyebabkan kemiskinan.

Dalam hal pendidikan, ditemukan bahwa umumnya pendidikan tertinggi yang pernah ditempuh responden adalah sekolah dasar yaitu sebanyak 36 %, hanya 36 % dari responden yang berpendidikan sekolah menengah

pertama, 44 % responden tidak pernah mengenyam Pendidikan formal.

2) Pendapatan Rumah Tangga

Dari hasil penelitian ditemukan rata-rata pendapatan yang diperoleh rumah tangga nelayan Rp1.153.200/bulan, dengan rata-rata pendapatan dari nelayan buruh Rp1.045.200/bulan. Upah ini lebih sedikit dibandingkan UMK Kabupaten Rokan Hilir Rp2.305.346,13/bulannya. Begitu pula selisih pendapatan dan pengeluaran, rata-rata bernilai negatif atau dengan kata lain pengeluaran rumah tangga nelayan buruh lebih besar dari pada pendapatan rumah tangganya

Nelayan di Desa Pulau Halang Muka umumnya hanya menggantungkan kebutuhan mereka dari hasil penangkapan dilaut. Namun pendapatan yang diterima sebagai nelayan tersebut belum lah bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka yang setiap harinya harus terpenuhi. Adapun sumbangan pendapatan dari keluarga nelayan buruh atau pendapatan non penangkapan ikan yang dilakukan istri nelayan juga belum bisa mengangkat perekonomian rumah tangga.

Kurangnya pembangunan di wilayah terpinggir seperti di Desa Pulau Halang Muka, menyebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan didaerah itu. Adapun lahan yang ada di Pulau Halang pun, juga tidak mampu memberikan kesejahteraan apabila dibuat sebagai lahan pertanian, karena kurang suburnya daerah tersebut.

3) Kepemilikan Modal

Masyarakat nelayan dalam kegiatan usaha penangkapan tentu sangat membutuhkan modal untuk

biaya operasional melautnya ataupun membuat alternatif usaha lain agar perekonomian rumah tangganya lebih baik, akan tetapi bagi masyarakat nelayan modal merupakan hal yang sangat sulit untuk mereka dapatkan.

Status sebagai nelayan buruh umumnya dinilai sebagai kalangan menengah kebawah. hal tersebut membuat akses terhadap beberapa fasilitas menjadi terbatas, salah satunya adalah fasilitas perbankan jika nelayan membutuhkan modal untuk membuat usahanya sendiri.

4) Struktur Sosial

Sebagai masyarakat pesisir yang didominasi oleh mata pencaharian melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, tentu dalam kesehariannya masyarakat nelayan berlangsung ikatan kerja terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut, salah satunya yang masih ada di Desa Pulau Halang Muka adalah pola hubungan kerja yang mengarah pada sistem patron klien. Pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat nelayan, menempatkan tauke/pemilik kapal sebagai pihak patron, dan nelayan sebagai klien.

Pada musim paceklik biasanya nelayan tidak dapat melaut karena ombak dilaut besar sehingga tidak mendapatkan ikan dan tidak mendapatkan penghasilan, sedangkan kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi. Di sinilah majikan berperan sebagai pelindung dan pemberi bantuan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga nelayan buruh baik berupa barang-barang konsumsi maupun pinjaman uang.

Melalui cara tersebut nelayan buruh merasa telah ditolong dari kesulitan yang dihadapi dan merasa berhutang budi atas pertolongan yang

telah diterimanya. Sebagai imbalan atas bantuan tersebut nelayan buruh cenderung menyetujui dan mematuhi kehendak majikannya. Keadaan ini terus berlanjut dan menumbuhkan sikap saling ketergantungan antara majikan dan nelayan buruh.

5) Teknologi Penangkapan

Teknologi juga akan menentukan tingkat eksploitasi nelayan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semakin modern alat tangkap yang digunakan, maka semakin tinggi pula jumlah tangkapan yang diperoleh nelayan. Dengan demikian teknologi yang digunakan oleh nelayan akan sangat mempengaruhi tingkat penghasilan nelayan.

Namun teknologi yang digunakan oleh nelayan di Desa Pulau Halang Muka masih tradisional dan hanya beroperasi di perairan dangkal dan sekitar Pulau Halang Saja.

6) Kebiasaan Konsumsi Rumah Tangga Nelayan Buruh

Pengaturan keuangan merupakan hal penting dalam rumah tangga nelayan. Terlebih pendapatan rumah tangga nelayan yang kecil, mereka harus bisa menggunakan keuangan yang rendah untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, dan adanya musim paceklik yang akan membuat keuangan rumah tangga semakin sedikit.

Menurut informan jumlah pendapatan yang diperoleh nelayan dapat berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga nelayan buruh. Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat nelayan yang kurang bijak dalam mengatur keuangan rumah tangga mereka. Ketika mereka memiliki keuangan yang berlebih,

mereka cenderung hidup tidak berhemat seperti membelanjakan uangnya ke warung-warung kopi, membelikan TV Parabola. Mempunyai kelebihan keuangan tersebut seharusnya mereka mengumpulkannya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pada saat musim paceklik tiba.

7) Beban Rumah Tangga

Selain kurang bijaknya dalam mengatur keuangan, banyaknya anggota keluarga juga menjadi penambah banyaknya pengeluaran di rumah tangga nelayan buruh. Secara sosial-psikologis, kehadiran seorang anak bagi sebuah keluarga memang akan menjadi pelengkap kebahagiaan dan sudah seharusnya disambut dengan gembira. Tetapi, bagi keluarga miskin, kehadiran anak terkadang kurang terkontrol, dan terkadang juga bisa memperparah keadaan kemiskinan rumah tangga, karna harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak seiring dengan banyaknya anggota keluarga tersebut.

Upaya Penanggulangan Oleh Pemerintah

Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir telah mengupayakan peningkatan kesejahteraan nelayan. Yaitu dengan memberikan bantuan dan merealisasikannya kepada nelayan berupa alat penangkapan, seperti mesin, jaring, bahkan kapal agar memudahkan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.

Program bantuan tersebut digadag-gadangkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan bertebaran di berbagai media, realitasnya di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Bantuan yang disalurkan pemerintah

tersebut belumlah tepat sasaran. Dalam menyalurkan bantuan saja belum mampu membedakan mana yang lebih didahulukan dan masih terdapatnya unsur nepotisme.

Ketidaktepatan sasaran bantuan terjadi karena yang menerima bantuan adalah kerabat atau orang terdekat penyeleksi program bantuan, bahkan sampai yang menerima bantuan tidak ada sangkut pautnya dengan penangkapan ikan. Selain itu terdapat juga alat tangkap yang diberikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh nelayan.

Selain bantuan alat tangkap yang dilakukan oleh pemerintah daerah Rokan Hilir, terdapat juga bantuan lain yang pernah diberikan oleh pemerintah pusat yaitu bantuan langsung tunai (BLT) dan Rastra. Bantuan tersebut realitasnya di lapangan juga belum efektif untuk menaggulangi kemiskinan. Dalam implementasinya yang menerima bantuan bukan hanya warga miskin, namun warga yang tergolong mampu tetap diberikan, bahkan terdapat bantuan Rastra yang diberikan untuk setiap warga, sehingga seharusnya masyarakat miskin bisa mendapatkan lebih banyak, harus berkurang karena berbagi jatah dengan warga lain yang mampu.

Kesalahan dalam pengentasan kemiskinan (Huraerah, 2005):

Pertama, Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan, kemiskinan tidak hanya meliputi dimensi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan dimensi budaya dan dimensi struktural atau politik. Dalam konteks budaya, orang miskin diindikasikan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis,

fatalistik, ketidakberdayaan, dan lain-lain. Sementara dalam konteks dimensi struktural atau politik, orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural dan politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

Kedua. Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang hanya didasarkan atas kemurahan hati, tidak akan mampu memunculkan dorongan dari masyarakat miskin sendiri untuk melakukan ikhtiar dan berupaya bagaimana mengatasi kemiskinan yang dihadapinya. Mereka akan selalu menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan pihak lain. Padahal program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi produktif.

Ketiga, Masyarakat miskin diposisikan sebagai obyek, yaitu kelompok yang dijadikan sasaran perubahan, bukan sebagai subyek yakni sebagai pelaku perubahan. Jika mereka diperlakukan sebagai obyek, berarti menjadikan mereka sebagai manusia pasif. Seharusnya mereka dijadikan sebagai subyek, yaitu sebagai pelaku perubahan yang aktif terlibat dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan.

Keempat, Pemerintah masih bertindak sebagai penguasa yang kerap kali turut campur tangan terlalu luas dalam kehidupan orang-orang miskin. Tindakan seperti ini justru mengabaikan potensi yang dimiliki masyarakat miskin. Sebaliknya, pemerintah semestinya bertindak sebagai fasilitator, yang

tugasnya adalah mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki.

Implikasi Penanggulangan Kemiskinan

Pertama, Sosialisasi terhadap masyarakat nelayan perlu diperdalam sehingga pemahaman dan menambah wawasan masyarakat nelayan, termasuk juga terhadap setiap program yang dibuat oleh pemerintah agar dapat diketahui dan dipahami secara baik oleh masyarakat nelayan. Sebagai contoh, program pemberdayaan seperti Pengembangan Usaha Mina Perikanan (PUMP) dari pemerintah pusat, yang sampai saat ini masih belum banyak diketahui nelayan dan masih sedikit yang mau berpartisipasi dalam program tersebut. Program tersebut harusnya bisa menambah modal nelayan untuk memiliki teknologi penangkapan yang lebih baik lagi. Bersamaan dengan itu dibutuhkan juga keseriusan pemerintah daerah dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan, dari setiap program penanggulangan kemiskinan.

Kedua. Bimbingan dari penyuluh. Keberadaan penyuluh perikanan mutlak diperlukan untuk turut serta mendorong terjadinya perubahan perilaku pada komunitas nelayan. Pendekatan penyuluhan yang tepat bukanlah dalam kerangka linier yang cenderung bersifat transfer teknologi, tetapi perlu mengutamakan pembelajaran dari dan oleh masyarakat nelayan itu sendiri, menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi, menjadi penting. Penyuluh dapat berperan lebih banyak sebagai fasilitator, konsultan, partner, dan

menjembatani antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait.

Semua program tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya perubahan perilaku pada masyarakat miskin, karena adanya kecenderungan masyarakat miskin yang menganggap perogram pemerintah adalah merupakan bantuan semata, yang dapat membuat nelayan bergantung dengan pihak luar, maka perlunya tenaga penyuluh. Hal paling mendasar yang perlu dibenahi adalah pengembangan nilai-nilai positif pada masyarakat miskin, seperti menumbuhkan rasa percaya diri, tidak berputus asa, mandiri, serta menghilangkan rasa ketidakberdayaan, ketergantungan dan lain-lain.

Ketiga. Membentuk KUB. Kelompok usaha bersama merupakan wadah dan sarana untuk meningkatkan kegiatan perikanan dan sebagai wahana dalam penyerapan teknologi dan informasi yang bermanfaat bagi anggota KUB menjadi motor penggerak tumbuhnya jiwa kewirausahaan bagi nelayan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan usaha. Melalui pelaksanaan pembinaan KUB dapat memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan nelayan. Selain itu diperlukan dukungan kebijakan operasional serta pembiayaan yang memadai dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah agar kegiatan pembinaan dan pengembangan KUB dapat terlaksana.

KUB yang didirikan haruslah mempunyai bidang yang saling mendukung antara KUB lainnya, harus adanya KUB yang bergerak dibidang penangkapan, dibidang pengolahan dan tentunya dibidang

pemasaran, agar usaha yang dilakukan KUB tetap berlanjut.

Keempat, Menciptakan program untuk mempermudah nelayan mendapatkan modal. Pemerintah pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama badan pertahanan nasional saat ini telah membuat program sertifikasi hak atas tanah nelayan (SeHAT Nelayan) yang sedang berlangsung. Namun kurangnya sosialisasi masih menjadi persoalan bagi masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pelosok sehingga minimnya informasi yang diperoleh nelayan di Desa Pulau Halang.

Kelima, Dengan besarnya potensi perikanan yang ada di Pulau Halang, industri perikanan perlu untuk ditingkatkan dengan penambahan produk olahan diversifikasi hasil perikanan, yang mempunyai nilai ekonomis rendah seperti ikan rucah, menjadi berekonomis tinggi. Produk olahan yang telah ada di Pulau Halang berupa terasi, dan ikan asin. Penambahan produk olahan seharusnya bisa dikembangkan lagi seperti abon ikan, nugget, ikan asap, bakso ikan, sosis ikan hingga pengalengan ikan, kecap ikan, tepung ikan, minyak ikan dan lain-lain. Dengan dibuatnya penambahan produk olahan tersebut target untuk menciptakan usaha alternatif akan mudah dikejar, karena banyaknya usaha pengolahan tersebut.

Keenam, Istri nelayan bisa bekerja mengolah hasil perikanan dengan membentuk suatu KUB pengolah perikanan. Kemiskinan yang diderita rumah tangga nelayan di karenakan rendahnya pendapatan suami karena ketidakpastian hasil penangkapan. Sehingga dengan adanya sumbangan pendapatan dari

sang istri bisa menambah pendapatan rumah tangga nelayan.

Penelitian yang terkait peran istri nelayan dalam rumah tangga dinilai sangat strategis terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga yang pada akhirnya dapat dijadikan sebuah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan yang selama ini selalu identik dengan kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan 66 % nelayan buruh termasuk dalam kategori miskin sekali dengan rata-rata pengeluaran perkapita pertahun senilai dengan 218 Kg beras atau setara dengan Rp2.617.257/tahun, selebihnya 44 % nelayan berada pada kategori miskin dengan rata-rata pendapatan perkapita pertahun senilai dengan 271 Kg beras atau setara Rp3.259.257/tahun.

Penyebab kemiskinan rumah tangga nelayan buruh yaitu : (1) Produksi perikanan rendah (2) Pendapatan rumah tangga nelayan rendah, (3) Pekerjaan alternatif kurang (4) Modal yang terbatas (5) Tingkat pendidikan rendah, (6) Nelayan masih bergantung dengan pemilik kapal, (7) Beban keluarga yang banyak dan (8) Pola konsumsi boros.

Upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Rokan Hilir untuk masyarakat nelayan berupa bantuan alat penangkapan, seperti kapal, jaring dan dari pemerintah pusat seperti bantuan langsung tunai, bantuan beras sejahtera (Rastra), asuransi nelayan dan PUMP. Dalam pelaksanaan bantuan tersebut masih

sarat akan nepotisme sehingga tidak tepatnya sasaran bantuan.

Adapun implikasi kebijakan penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu : (1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat nelayan dengan sosialisasi, (2) Bimbingan dari tenaga penyuluh perikanan profesional, (3) Penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUB), (4) Permudah akses nelayan terhadap modal, (5) Menciptakan usaha alternatif untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan di Desa Pulau Halang Muka dan (5) Meningkatkan partisipasi istri nelayan terhadap pendapatan rumah tangga.

Saran

Masyarakat nelayan juga perlu membentuk suatu kelompok nelayan, pengaktifan KUB, koperasi nelayan dan TPI sehingga mereka dapat memecahkan masalah-masalah mereka bersama.

Pemerintah selaku pelaksana amanat bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya, diharapkan serius dalam upaya pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2008. Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan. Archive Bps.go.id. <http://daps.bps.go.id/File%20Pub/Analisis%20Kemiskinan%202008.pdf>. (Diakses 21 Februari 2017).
- GAPRI/OXFAM. 2003. Advokasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (*Buku Panduan*). Slideshare.net. <https://www.slideshare.net/OswarMungkasa/10-panduan-spkd-gapri-oxfam>. (Diakses 21 Februari 2017).
- Huraerah. 2013. Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Vol. 12, No. 1. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jurnalpemberdayaan/article/view/15600>. (Diakses 7 Oktober 2017).
- Kuncoro, M. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN: Yogyakarta. 466 hal.
- Kusnadi. 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. LKiS Pelangi Aksara : Yogyakarta. 148 hal.